

Gerakan Koko Pede Mengantisipasi Calon Tunggal pada Pilkada Kebumen Tahun 2024

Arif Widodo¹, Sukataman²

IAINU Kebumen

widodoarif133@gmail.com¹, sukattamam@gmail.com²

Abstract

The Koalisi Konco Pejuang Demokrasi (Koko Pede) movement is strengthening in seeking alternative candidates following the incumbent Arif Sugiyanto - Ristawati Purwaningsih's move to run again in the 2024 regional elections. This study aims to reveal the Koko Pede movement in anticipation of a single candidate in the 2024 Kebumen regional elections so that it is not like the previous regional elections in 2020 which were only contested by Arif - Rista. This research method is qualitative descriptive using the theory of new social movements from Sidney Tarrow. The results of the study reveal Koko Pede's strategy which does not block the incumbent from running in the 2024 regional elections after the emergence of alternative candidates Lilis Nuryani – Zaeni Miftah. This is because the opportunity to become a single candidate also came to Lilis – Zaeni before the determination of the candidate by the Komisi Pemilihan Umum (KPU). Therefore, Koko Pede plays a significant role in maintaining democracy running healthily and with dignity with the absence of a single candidate in the 2024 Kebumen regional elections.

Keywords: Regional Election, Single Candidate, Koko Pede Movement

Abstrak

Gerakan Koalisi Konco Pejuang Demokrasi (Koko Pede) menguat dalam mengupayakan calon alternatif menyusul gelagat petahana Arif Sugiyanto – Ristawati Purwaningsih kembali maju pilkada 2024. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap gerakan Koko Pede mengantisipasi calon tunggal pada pilkada Kebumen 2024 agar tidak seperti pilkada sebelumnya pada 2020 yang hanya diikuti Arif - Rista. Metode penelitian ini deskriptif kualitatif dengan menggunakan teori gerakan sosial baru dari Sidney Tarrow. Hasil penelitian mengungkap strategi Koko Pede yang tidak menjegal petahana untuk maju pilkada 2024 setelah kemunculan calon alternatif Lilis Nuryani – Zaeni Miftah. Sebab peluang untuk menjadi calon tunggal juga datang ke Lilis – Zaeni sebelum penetapan calon bupati – calon wakil bupati oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Oleh karena itu, Koko Pede berperan signifikan dalam menjaga demokrasi berjalan sehat dan bermartabat dengan tidak adanya calon tunggal pada pilkada Kebumen 2024.

Kata Kunci : Pilkada, Calon Tunggal, Gerakan Koko Pede

PENDAHULUAN

Pelaksanaan pilkada langsung sejak 2005 dan pilkada serentak mulai 2015 masih menyisakan masalah tak berkesudahan. Pelaksanaan pilkada langsung menyusul pergantian Orde Baru ke reformasi pada 1998 itu sebelumnya didahului dengan pemilihan presiden dan wakil presiden pada tahun 2004. Pilkada langsung berpeluang mendorong majunya calon kepala daerah yang kredibel dan akseptabel di mata masyarakat sekaligus menguatkan derajat legitimasinya. Dengan demikian, pilkada langsung dapat memperluas akses masyarakat lokal untuk mempengaruhi proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan mereka. Masyarakat dalam hal ini berkesempatan untuk terlibat memengaruhi pembuatan kebijakan publik yang dilakukan kepala daerah sebagaimana janjinya saat kampanye dan ikut pula mengawasi kepala daerah jika menyalahgunakan kekuasaan, sehingga proses yang dilakukan ini dapat memaksa kepala daerah untuk tetap memperhatikan aspirasi rakyat.¹

Pilkada langsung diyakini sebagai jalan demokratis dalam memilih kepala daerah setelah sekian lama dalam kungkungan Rezim Orde Baru yang tidak memberikan kesempatan rakyat menentukan sendiri pemimpinnya.² Melalui pilkada, rakyat memiliki kekuatan besar untuk mengatur, menjalankan dan mengawasi pelaksanaan kebijakan pemerintah di segala lini. Demokrasi mengubah cara pandang masyarakat mengenai pengelolaan manajemen pemerintahan yang tadinya bersifat perintah menjadi musyawarah. Untuk memenuhi harapan besar tersebut antara lain dengan cara melihat bagaimana proses yang dilakukan oleh partai politik dalam mengajukan calon-calon pemimpin daerah yang akan mereka usung.³

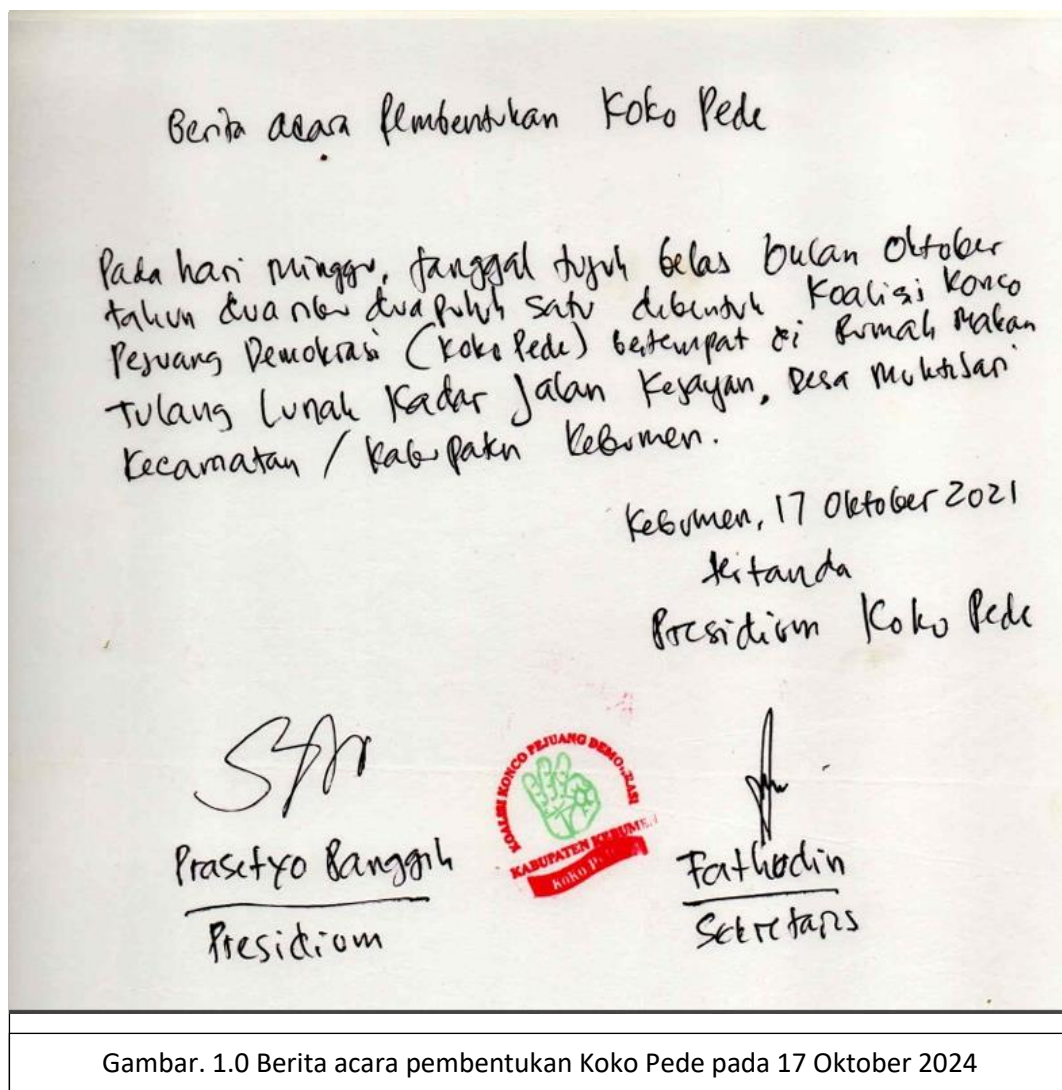
Ini berarti pengajuan kandidasinya harus memperhatikan aspirasi masyarakat serta melalui musyawarah. Bukan kasak kusuk di 'ruang gelap' yang mengabaikan kehendak rakyat. Alih-alih pengajuan kandidasi memperhatikan

¹ Hanafi, Ridho Imawan. 2014. *Pemilihan Langsung Kepala Daerah di Indonesia : Beberapa Catatan Kritis Untuk Partai Politik : Direct Election For Local Leader In Indonesia*. Jurnal Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia

² <https://eprints2.undip.ac.id/id/eprint/24977/3/BAB%20II.pdf>

³ Prameswari, Lala Miami. 2016. *Pilkada dalam Mewujudkan Demokrasi*. (<https://babel.bawaslu.go.id/pilkada-dalam-mewujudkan-demokrasi/>)

aspirasi masyarakat, malah terjadi persekongkolan para elit dalam mengukung calon tunggal dengan memborong seluruh partai politik untuk dijadikan kendaraan maju pilkada. Pilkada Kebumen 2020 yang diikuti calon tunggal Arif Sugiyanto – Ristawati Purwaningsih berhasil menang dari kotak kosong. Mereka berkuasa sekitar tiga tahun dan kembali maju pilkada serentak Se-Indonesia pada 27 November 2024. Terkait hal tersebut rupanya telah diantisipasi oleh Koalisi Konco Pejuang Demokrasi (Koko Pede) yang dibentuk pada 17 Oktober 2021. Di mana pilkada 2020 kecolongan adanya calon tunggal.



Gambar. 1.0 Berita acara pembentukan Koko Pede pada 17 Oktober 2024

Sebelum mengantisipasi calon tunggal pada pilkada 2024, Koko Pede yang awalnya bernama Masyarakat Kotak Kosong (Mas Koko) melakukan perlawanan terhadap calon tunggal saat pilkada Kebumen 2020, sekaligus mensosialisasikan kotak kosong sebagai pilihan yang sah. Hingga kemudian, gerakannya menguat

ketika petahana memiliki gelagat untuk kembali maju pada pilkada Kebumen 2024. Karena itu penting dilakukan penelitian untuk mengungkap gerakan Koko Pede mengantisipasi calon tunggal pada pilkada 2024. Selain berguna untuk pendidikan politik dan membangun demokrasi yang sehat dan beradab di Kebumen, juga bisa mendorong daerah lain mengantisipasi calon tunggal, baik daerah yang saat pilkada 2024 terdapat calon tunggal maupun daerah lainnya yang pernah atau belum terdapat calon tunggal.

Diketahui, jumlah calon tunggal terus mengalami kenaikan dalam setiap penyelenggaraan pilkada langsung. Berdasarkan data Bawaslu, pilkada 2015 hanya ada tiga calon tunggal, lalu pilkada 2017 bertambah menjadi sembilan calon tunggal. Kemudian pilkada 2018 bertambah menjadi 16 calon tunggal dan pilkada 2020 terdapat 25 calon tunggal, termasuk Kebumen. Pilkada serentak 2024 masih terdapat 37 calon tunggal.⁴ Bagi daerah yang terdapat calon tunggal, tentunya dapat belajar dari Kebumen terkait antisipasi calon tunggal pada pelaksanaan pilkada berikutnya. Terutama mengenai partisipasi masyarakat dalam proses kandidasi agar persaingannya antara orang dengan orang, bukan antara orang dengan kotak kosong. Mengingat, potensi untuk menjadi calon tunggal bisa diambil oleh kandidat siapa saja, baik dari calon petahana maupun calon alternatif. Penelitian ini menitikberatkan pada gerakan Koko Pede mengantisipasi calon tunggal pada pilkada Kebumen 2024. Waktunya paska pemilu serentak yang berbarengan dengan pemilihan presiden (Pilpres) dan pemilihan legislatif (Pileg) pada 14 Februari 2024 hingga penetapan calon oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada 22 September 2024.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang dilakukan secara sistematis dengan mengangkat data di lapangan. Pendekatannya menggunakan metode deskriptif kualitatif, di mana data-data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar-gambar dan bukan angka. Data-data tersebut dapat diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, foto, video tape, dokumentasi pribadi, catatan, atau memo dan dokumentasi lain dari objek penelitian.⁵

⁴<https://www.bawaslu.go.id/id/berita/fenomena-calon-tunggal-dalam-pilkada-meningkat-abhan-menarik-dijadikan-penelitian>

⁵ Moleong Lexy J. 2005. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya

Data yang diperoleh dari penelitian yang fokus pada gerakan Koko Pede mengantisipasi calon tunggal pada pilkada Kebumen 2024, berasal dari hasil wawancara (*interview*), observasi (pengamatan lapangan) dan dokumentasi. Wawancara merupakan proses percakapan dengan maksud untuk mengkonstruksi mengenai orang, kejadian, kegiatan, organisasi, motivasi, perasaan, dan sebagainya yang dilakukan dua pihak.⁶ Mengenai teknik yang dilakukan dalam wawancara kali ini adalah wawancara terstruktur yang ditujukan kepada Presidium Koko Pede, Pegiat Koko Pede dan Wartawan Radar Jogja yang bertugas di Kebumen. Masing-masing diwawancara secara terpisah. Wawancara ini bertujuan untuk menggali informasi mendalam dari para informan. Teknik ini dilakukan secara akrab dengan pertanyaan yang terbuka dan biasa sehari-hari. Hal yang dilakukan ini akan lebih mampu menggali kejujuran dari jawaban-jawaban yang diberikan oleh para informan.⁷

Wawancara yang dilakukan dengan Presidium dan Pegiat Koko Pede berguna untuk mendapatkan informasi tentang alasan mereka melakukan gerakan dan upaya-upaya yang dilakukan dalam mengantisipasi calon tunggal pada pilkada Kebumen 2024. Sedangkan wawancara yang dilakukan dengan pelaku media atau wartawan Radar Jogja yang bertugas di Kebumen untuk mengetahui tanggapan mereka terhadap gerakan Koko Pede yang tidak mendapatkan dukungan publikasi dari kalangan pers sebagai pilar keempat demokrasi. Padahal yang dilakukan Koko Pede berkaitan dengan perjuangan demokrasi. Adapun dalam melakukan observasi guna mengetahui bentuk gerakan Koko Pede, alasan melakukan gerakan dan tindak lanjut dari hasil gerakan tersebut yang berhasil menyuguhkan kompetisi antara orang dengan orang, bukan antara orang dengan kotak kosong.

Di dalam penelitian ini, dokumen yang digunakan adalah berita acara pembentukan Koko Pede serta dokumentasi lainnya.⁸ Teori yang digunakan yakni gerakan sosial baru yang dikenalkan oleh Sidney Tarrow. Teori tersebut menekankan suatu gerakan dipengaruhi tiga faktor.⁹ Untuk mendukung rangkaian

⁶ Ibid.

⁷ Bungin, Burhan. 2003. *Analisis Data Penelitian Kualitatif "Pemahaman Filosofis dan Metodologis ke Arah Penguasaan Model Aplikasi"*. Jakarta : Raja Grafindo Persada

⁸ Arikunto S. 1998. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Cetakan ke-11. Jakarta: PT Rineka Cipta

⁹ Tarrow, Sidney. 1994. *Power in Movement: Social Movement, Collective Action, and Politics*. New York: Cambridge University Press.

analisis tersebut terdapat lima komponen yang mendasari gerakan Koko Pede meliputi struktur, tantangan kolektif (*collectif challenge*), tujuan bersama, solidaritas dan identitas kolektif, serta melihat politik perlawanan.¹⁰

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perlawanan terhadap Calon Tunggal

Perlawanan terhadap calon tunggal sudah dilakukan Koalisi Konco Pejuang Demokrasi (Koko Pede) saat pilkada Kebumen 2020 yang hanya diikuti satu pasangan calon. Perlawanan sejak masih mengatasnamakan Masyarakat kotak Kosong (Mas Koko) itu berlanjut hingga menghadapi pilkada Kebumen 2024 yang dilaksanakan secara serentak di seluruh Indonesia pada 27 November 2024. Berdasarkan data KPU, pilkada serentak 2024 diikuti sebanyak 545 daerah, terdiri atas 37 provinsi, 415 kabupaten, dan 93 kota.¹¹

Dalam penelitian terdahulu menyebutkan keberadaan calon tunggal berdampak negatif terhadap demokrasi, sehingga relawan menggunakan pilihan rasional dalam menentukan pilihannya pada pilkada Kabupaten Pati 2017.¹² Kemenangan para calon tunggal dalam pilkada bisa menghambat proses demokrasi lokal karena mekanisme *check and balances* tidak berjalan.¹³ Penelitian lainnya mengungkapkan Jaringan Kotak Kosong dalam Pilkada Kota Tangerang 2018 menggunakan strategi dengan merangkul ulama serta tokoh agama yang memiliki basis besar di masyarakat untuk memperluas dukungan terhadap kotak kosong.¹⁴ Selanjutnya dijelaskan mengenai faktor ketokohan calon (*figure*) merupakan faktor dominan yang menyebabkan partai politik yang ada di wilayah Kabupaten Minahasa Tenggara, sehingga kesulitan mendukung pasangan lain dalam pilkada

¹⁰ Suharko. 2006. *Gerakan Sosial Baru di Indonesia : Repertoar Gerakan. Petani*. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 1-34.

¹¹ <https://undiknas.ac.id/2024/06/melawan-kotak-kosong-menata-ulang-demokrasi-untuk-keadilan-dan-institusi-yang-kuat/>

¹² Mukhtar, Rifqi Shofiana. 2019. *Pandangan Politik Relawan Kotak Kosong Terhadap Calon Tunggal di Pilkada Kabupaten Pati Tahun 2017*. Skripsi. Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

¹³ Romli, Lili. 2018. *Pilkada Langsung, Calon Tunggal dan Masa Depan Demokrasi Lokal*. Jurnal Penelitian Politik. BRIN. Volume 15 No. 2

¹⁴ Sari, Diana Novita. 2020. *Gerakan Sosial dan Pilkada (Studi tentang Jaringan Kotak Kosong dalam Pemilihan Kepala Daerah Kota Tangerang Tahun 2018)*. Skripsi. Program Studi Ilmu Politik Fakultas Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah

tersebut.¹⁵ Adapun penelitian terdahulu berikutnya menyebutkan belum optimalnya fungsi partai politik dalam melakukan proses pengusungan kandidat yang dalam praktiknya masih elitis, buruknya rekrutmen calon dan partai politik hanya sebatas sebagai kendaraan atau pemberi tiket. Di samping itu masih abainya partai politik pada suara kritis publik terhadap persoalan yang menyangkut politik kekerabatan dan korupsi di daerah.¹⁶

Penelitian terdahulu yang relevan terdapat kesinambungan pengawasan demokrasi oleh Koko Pede paska terpilihnya calon tunggal Arif Sugiyanto – Ristawati Purwaningsih sebagai bupati dan wakil bupati Kebumen. Gerakan yang dilakukan itu juga menjadi bagian tak terpisahkan dari partisipasi masyarakat berbasis kearifan lokal dalam menumbuhkan demokrasi di Kebumen.¹⁷ Dari penelitian yang sudah ada sebelumnya tersebut ternyata belum mengungkap partisipasi masyarakat dalam proses kandidasi calon kepala daerah. Terutama mengantisipasi calon tunggal yang dilakukan oleh Koko Pede pada pilkada Kebumen 2024.

Salah satu pegiat Koko Pede, Azis Suprayitno membeberkan perlawanan dilakukan sejak adanya calon tunggal pada pilkada 2020 melalui media sosial yang diklaimnya lebih unggul. Pegiat Koko Pede lainnya, Pawito dalam postingan *facebook* menyinggung media sosial lebih dipilih sebagai sarana untuk menyampaikan unek-unek masyarakat ketimbang melalui wakil rakyat di Gedung DPRD Kabupaten Kebumen. Postingan dari para pegiat Koko Pede yang bernada kritis pun menghiasi *facebook* dalam mengawal demokrasi di Kebumen serta mengawasi jalannya pemerintahan Arif – Rista yang memenangkan pilkada 2020.

Penggunaan facebook sebagai sebuah kebebasan berpendapat adalah bentuk kebebasan ekspresif yang menjadi sarana bagi ruang ‘publik politis’ dalam kondisi-kondisi komunikasi yang memungkinkan warga Negara membentuk opini dan kehendak bersama secara diskursif ruang publik. Terhambatnya kebebasan berpendapat masyarakat melalui instrumen aspirasi seperti dewan perwakilan rakyat,

¹⁵ Saweho, Grendy A. dkk. 2019. *Calon Tunggal dan Pilkada*. Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Sam Ratulangi Manado

¹⁶ Hanafi, Ridho Imawan. 2014. *Pemilihan Langsung Kepala Daerah di Indonesia : Beberapa Catatan Kritis untuk Partai Politik*. Jurnal Penelitian Politik. Volume 11 No.2

¹⁷ Widodo, Arif. 2021. *Partisipasi Masyarakat Berbasis Kearifan Lokal dalam Menumbuhkan Demokrasi di Kebumen*. Jurnal Ar-Rihlah Inovasi Pengembangan Pendidikan Islam Volume. 6. No.1

pemerintah dan media massa telah mendorong masyarakat untuk memilih facebook sebagai sarana penyampian aspirasi yang mudah dan dapat diakses dengan luas. Facebook sebagai jejaring social pertemanan telah mengalami rekonstruksi sosial oleh penggunaanya menjadi sebuah media alternatif dalam menyuaran pendapatnya yang selama ini tidak menemukan “kanalisasi aspirasi”. Pada umumnya hanyalah kebebasan dalam ekspresi dan saluran pesan terbuka, namun tidak menyentuh hakikat dasar kebebasan berpendapat itu sendiri yakni kebebasan berpendapat yang didasarkan pada tanggung jawab social dan pengetahuan akan konteks wacana yang ada.¹⁸

Presidium Koko Pede Prasetyo Panggih yang diwawancarai pada 1 Agustus 2024 mengungkapkan, selama kepemimpinan Arif – Rista, pihaknya ‘menggambil alih’ pengawasan dari Anggota DPRD Kabupaten Kebumen yang dinilai mati suri. Ini lantaran seluruh partai politik pemilik kursi legislatif telah diborong oleh Arif - Rista. Sehingga, seluruh kekuatan partai politik yang termanifestasikan di DPRD Kebumen menjadi satu. Sementara pengawasan dari wakil rakyat itu tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Prasetyo Panggih menjelaskan, keberadaan calon tunggal membawa dampak buruk terhadap demokrasi di Kebumen dan berimplikasi terhadap mati surinya pengawasan dari legislatif terhadap jalannya pemerintahan. Keberadaan calon tunggal yang memborong seluruh partai politik pun menjadikan demokrasi tidak berjalan sehat, bahkan tidak beradab karena berpotensi terjadi politik uang atau yang dikenal dengan mahar politik. Di sisi lain, peran media di Kebumen kurang optimal dalam melakukan pengawasan. Justru media sebagai salah satu pilar demokrasi itu cenderung berpihak kepada penguasa.

Salah satu wartawan Radar Jogja yang bertugas di Kebumen, M Hafied yang diwawancarai terpisah menjelaskan alasannya karena kepentingan ekonomi politik, di mana keberlangsungan media tidak lepas dari pendapatan iklan. Keberadaan calon tunggal hingga terpilih pada pilkada Kebumen 2020 memberikan kontribusi dengan adanya iklan. Begitu juga ketika Arif – Rista berkuasa hingga menghadapi pilkada Kebumen 2024. Sedangkan dari pihak Koko Pede tidak pernah memasang iklan di medianya. Di sini para aktor politik memainkan perannya dalam melakukan

¹⁸ Habermas, J. (2006). *Teori tindakan komunikatif buku 1: Rasio dan Rasionalisasi Masyarakat*. Yogyakarta: Kreasi Wacana

komunikasi politik. Bagi Koko Pede, komunikasi politik yang dijalankan tidak lepas dari upaya mengantisipasi calon tunggal pada pilkada Kebumen 2024.

Komunikasi politik terbagi menjadi tiga bagian penting. Pertama, komunikasi politik merupakan suatu bentuk komunikasi yang dilakukan oleh politikus atau aktor politik semata-mata hanya untuk mencapai tujuannya tertentu. Kedua, komunikasi politik ditujukan kepada aktor politik oleh non politikus seperti pemilih dan kolumnis. Ketiga, aktor politik dan kegiatan mereka, merupakan isi yang dimuat berita, editorial, dan berbagai bentuk media.¹⁹

Meskipun tidak mendapat sokongan pemberitaan dari media, Koko Pede terus bergerak dan gerakannya menguat untuk mengantisipasi calon tunggal menyusul gelagat majunya *incumbent* (petahana) Arif – Rista pada pilkada Kebumen 2024. Dalam melakukan gerakan tersebut, Koko Pede bisa dikatakan mewakili aspirasi masyarakat Kebumen. Gerakannya yang mengantisipasi calon tunggal pada pilkada Kebumen 2024 mampu menjaga demokrasi yang sehat dan beradab. Terutama dalam proses kandidasi calon kepala daerah yang selama ini disorot oleh berbagai pihak lantaran penuh dengan politik dagang sapi atau politik uang yang dikenal pula dengan mahar politik. Praktik tersebut jauh dari demokrasi sehat dan beradab.

Hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain adanya kekuatan penentu dari partai politik dan pengaruh dari kekuatan oligarki yang cenderung bermain mengendalikan siapa yang mereka kehendaki untuk maju pada pilkada di suatu daerah.²⁰ Kondisi itu dipahami Koko Pede dengan mengambil peran partai politik. Baik dalam memberikan edukasi politik maupun moderasi beragama. Terkait edukasi politik diketahui masih terdapat sikap pragmatis dari partai politik. Selain itu bergerak kalau ada maunya, pengkaderan perempuan masih kurang dan sikap apatis masyarakat terhadap partai politik.²¹ Partai politik sebagai penggerak moderasi beragama seharusnya menjalankannya supaya tercipta demokrasi yang

¹⁹ McNair, Brian. 2003. *An Introduction To Political Communication*. New York: Rotlegde

²⁰ Abdullah. 2024. *Lunturnya Hak Politik Kandidasi Calon Kepala Daerah Dalam Kekuasaan Partai Akibat Ongkos Pemilu Yang Mahal*. Jurnal Kolaboratif Sains Universitas Muhammadiyah Palu Vol. 7 No. 10

²¹ Daud, Muhammad Daffa. 2019. *Partai Politik dan Pendidikan Politik . Studi atas Program Pendidikan Politik Partai Golongan Karya Kota Tangerang Selatan*. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta

sehat dan berkeadaban.²² Demokrasi berkeadaban dapat diartikan sebagai sebuah sistem pemerintahan berlandaskan nilai-nilai keadaban dan kesopanan dengan mengutamakan persamaan hak dan kewajiban warga negaranya.²³

Gerakan Sosial Baru

Gerakan sosial adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh sekelompok orang yang memiliki kepentingan dan tujuan bersama untuk melakukan suatu perlawanan atau menentang suatu kebijakan seseorang atau kelompok yang mereka anggap sebagai musuh politik. Adapun gerakan sosial baru dalam artian adanya kebebasan pada gerakan itu sendiri, seperti tidak memiliki organisasi, tidak debirokratisasi, tetapi mempunyai tujuan yang sama. Gerakan ini lebih fokus pada upaya agar pemerintah lebih memperhatikan kembali di luar kepentingan materiil. Gerakan sosial juga manivestasi dari kebangkitan *civil society*.²⁴ Ketua KPU periode 2017-2022 Arief Budiman menjelaskan bahwa *civil society* bisa mencegah negara terlalu besar kontrolnya terhadap proses demokrasi yang malah membuat ketidakadilan.²⁵

Penelitian lapangan (*field research*) ini menggunakan teori gerakan sosial baru yang dikenalkan oleh Sidney Tarrow. Gerakan sosial adalah sekelompok orang yang mengatur dan mengorganisir dalam upaya untuk menolak beberapa jenis perubahan sosial yang dirasa tidak sesuai dengan kehendaknya. Gerakan sosial juga merupakan individu-individu dengan sedikit atau banyak kekuatan politik yang dimilikinya lalu mereka bersatu untuk mendapatkan dan memperjuangkan beberapa hal yaitu perubahan sosial.²⁶

Ciri gerakan sosial terdapat suatu penentangan atau penolakan secara kolektif oleh orang-orang yang mempunyai solidaritas dan tujuan yang sama dalam proses interaksi yang terus menerus dengan pihak elite, pihak lawan, dan pihak yang berwenang. Tarrow menjelaskan bahwa konsep gerakan sosial harus memiliki lima

²² Abqa, Muhammad Ardhi Razaq. 2020. *Partai Politik Dan Moderasi Beragama Sebagai Pilar Demokrasi di Indonesia*. Jurnal Resiprokal Universitas Tidar Magelang Vol. 2 No. 1

²³ Malik, Gabriela Akhira dkk. 2021. *Penerapan Demokrasi Berkeadaban dalam Kebudayaan dan Tradisi Suku Bugis*. Jurnal Kewarganegaraan ITB Vol. 5 No. 2

²⁴ Parmoji, Mochamad. *Kebangkitan Civil Society di Indonesia*. Jurnal At-Taqaddum, ,Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Negeri Islam Walisongo

²⁵ <https://fisipol.ugm.ac.id/kpu-ingin-civil-society-terlibat-aktif-di-tahun-politik/>

²⁶ Sukmana, Oman. 2016. *Konsep dan Teori Gerakan Sosial*. Malang : Intrans Publishing

komponen yang mendasari meliputi struktur, tantangan kolektif (*collectif challenge*), tujuan bersama, solidaritas dan identitas kolektif, dan melihat politik perlawanan.²⁷

Konsep Gerakan Koko Pede

Konsep Gerakan	Uraian
Struktur	Koko Pede dipimpin oleh presidium yang berjumlah empat orang, di mana masing-masing memiliki kedudukan setara dan luwes dalam melakukan gerakan dan menjalin komunikasi politik.
Tantangan kolektif	Memperjuangkan demokrasi yang sehat dan beradab
Tujuan bersama	Koko Pede yang sebelumnya bernama Mas Koko melakukan perlawanan terhadap calon tunggal pada pilkada Kebumen 2020. Selanjutnya bersama-sama mengawasi bupati yang berasal dari calon tunggal dengan ‘mengambilalih’ pengawasan dari Anggota DPRD Kabupaten Kebumen yang dinilai mati suri. Kemudian menyatu dalam mengantisipasi calon tunggal pada pilkada Kebumen 2024 untuk menghadapi petahana yang memiliki gelagat kembali maju pada pesta demokrasi langsung tersebut.
Solidaritas dan identitas kolektif	Gerakan Koko Pede disambut gembira oleh sejumlah elite politik dan pengusaha yang menginginkan adanya calon alternatif selain petahana.
Melihat politik perlawanan	Koko Pede masih terus melakukan gerakan dalam mengantisipasi calon tunggal ketika sudah ada calon alternatif. Kali ini justru mengantisipasi munculnya calon tunggal dari calon alternatif yang berpotensi melakukan hal yang sama seperti petahana saat mengikuti pilkada 2020 yakni menjadi calon tunggal.

Tabel.1.0. Konsep Gerakan Koko Pede

²⁷ Suharko. 2006. *Gerakan Sosial Baru di Indonesia : Repertoar Gerakan. Petani*. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 1-34

1. Struktur

Gerakan sosial baru memiliki struktur yang tidak kaku, bersifat mengalir, untuk menghindari bahaya oligarkisasi. Hal itu diwujudkan dengan adanya upaya rotasi kepemimpinan, melakukan voting untuk semua isu, memiliki organisasi *ad hoc* yang tidak permanen. Gerakan sosial baru menciptakan struktur lebih responsif terhadap kebutuhan individu dalam bentuk struktur yang terbuka, terdesentralisasi dan nonhirarkis.²⁸

Struktur Koko Pede dipimpin oleh presidium. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), presidium diartikan sebagai pimpinan tertinggi suatu badan yang terdiri atas beberapa orang. Terdapat empat orang sebagai Presidium Koko Pede yang masing-masing memiliki kedudukan setara dan luwes dalam melakukan gerakan. Masing-masing personel juga memiliki akses ke partai politik dan para elite, sehingga terbuka jalan untuk menjalin komunikasi politik dan memainkan peran penting dalam proses kandidasai kepala daerah menghadapi pilkada 2024. Berbeda ketika menghadapi pilkada 2020 yang kecolongan terdapat calon tunggal.

2. Tantangan kolektif (*collective challenge*)

Salah satu hal yang membedakan gerakan sosial dengan tindakan-tindakan kolektif lainnya seperti bermain sepakbola, menonton pertunjukkan musik adalah adanya tantangan kolektif. Gerakan sosial selalu ditandai adanya tantangan-tantangan untuk melawan melalui aksi langsung yang 'mengganggu' para elit, pemegang otoritas, kelompok-kelompok lain atau aturan-aturan kultural tertentu. tantangan kolektif juga ditandai dengan tindakan menghalangi, membuat ketidakpastian terhadap aktivitas pihak lain yang coba mereka lawan melalui gerakan sosial. Tantangan kolektif merupakan karakteristik yang paling umum dari gerakan sosial. Seringkali, salah satu komponen dalam gerakan sosial itu disimbolkan dalam bentuk, slogan, corak pakaian, perilaku pribadi, penamaan baru objek-objek yang familiar dengan simbol yang baru ataupun berbeda dan lain-lain. Tantangan kolektif merupakan hal yang menjadi *focal point* (titik fokus) bagi aktor gerakan sosial, untuk

²⁸ Ibid.

memperoleh perhatian dari pihak yang dilawan dan menciptakan konstituen untuk diwakili.²⁹

Koko Pede yang mengusung demokrasi sehat dan beradab di Kebumen mula-mula menyasar petahana yang mendapatkan kekuasaan atas keikutsertannya sebagai calon tunggal pada pilkada 2020. Menurut Presidium Koko Pede Prasetyo Panggih, adanya calon tunggal berdampak negative terhadap demokrasi sekaligus menunjukkan demokrasi tidak berjalan sehat. Di samping itu, tindakan calon tunggal yang memborong partai politik dan berpotensi terjadi politik uang juga menjadi penilaian tersendiri bahwa demokrasi yang dijalankan tidak beradab. Praktis, tantangan kolektif bagi Koko Pede yakni memperjuangkan demokrasi yang sehat dan beradab di Kebumen.

3. Tujuan bersama

Terdapat banyak alasan mengapa akhirnya individu bergabung dengan gerakan sosial. Alasan-alasan tersebut berbeda-beda tergantung dengan pertimbangan individu masing-masing. Namun, jika dilihat secara konseptual, alasan paling jelas mengapa individu tergabung dalam gerakan sosial adalah untuk menyusun klaim bersama menentang pihak lawan, pemegang otoritas atau para elit.³⁰

Koko Pede yang sebelumnya bernama Mas Koko melakukan perlawanan kepada calon tunggal saat pelaksanaan pilkada Kebumen 2020. Selanjutnya bersama-sama mengawasi bupati yang berasal dari calon tunggal dengan ‘mengambilalih’ pengawasan dari Anggota DPRD Kabupaten Kebumen yang dinilai mati suri. Kemudian menyatu dalam mengantisipasi calon tunggal pada pilkada Kebumen 2024 untuk menghadapi petahana yang memiliki gelagat kembali maju pada pesta demokrasi langsung tersebut.

4. Solidaritas dan identitas kolektif

Pertimbangan kepentingan bersama dari partisipan merupakan penggerak bersama (*common denominator*) dari gerakan sosial yang kemudian menjembatani perubahan yang semula hanya potensi menjadi aksi nyata. Gerakan sosial akan dapat berjalan apabila terdapat perasaan-perasaan solidaritas atau identitas, yang seringkali bersumber dari rasa nasionalisme,

²⁹ Ibid.

³⁰ Ibid.

etnisitas, agama ataupun kesamaan minat tertentu, misal minat terhadap isu sosial, lingkungan, HAM, gender dan lain-lain.³¹

Gerakan Koko disambut gembira oleh sejumlah elite partai politik dan pengusaha di Kebumen yang menginginkan adanya calon alternatif selain petahana. Dalam hal ini diawali dari respons Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang menang pemilihan legislative (pileg) di Kebumen hendak ‘mangkat dhewek’ (maju sendiri) untuk menghadapi pilkada Kebumen yang dilaksanakan serentak Se-Indonesia pada 27 November 2024. Gayung bersambut dari sejumlah pengusaha dan Partai Nasdem yang kemudian bersepakat mengajukan calon alternatif selain petahana.

5. Melihat politik perlawanan

Dengan terus memelihara aksi kolektif melawan pihak tertentu, suatu tindakan perlawanan akan bisa menjadi gerakan sosial. Komponen tujuan kolektif, identitas bersama dan tantangan yang dapat diidentifikasi membantu gerakan sosial dalam upaya memelihara politik perlawanan. Aksi kolektif dalam interaksi dengan pihak lawan yang kuat menandai titik pergerseran di mana suatu penentangan (*contention*) berubah menjadi suatu gerakan sosial.³²

Gerakan Koko Pedes masih terus berlanjut dalam mengantisipasi calon tunggal ketika sudah muncul calon alternatif. Antisipasi berlipat-lipat itu lantaran ada potensi kandidat siapa saja menjadi calon tunggal seperti petahana saat mengikuti pilkada 2020. Untuk memperkuat analisis mengenai gerakan Koko Pedes mengantisipasi calon tunggal pada pilkada Kebumen 2024, dapat diungkap lebih lanjut melalui unit-unit analisis yang meliputi peluang politik, struktur mobilisasi, dan proses framing.³³

Analisis Gerakan Koko Pedes

Unit-unit	Uraian
Peluang politik	Presidium Koko Pedes yang berjumlah empat orang memiliki kedekatan dengan partai politik seperti PKB, Nasdem, PDIP dan Golkar. Bahkan dengan Gerindra,

³¹ Ibid.

³² Ibid.

³³ McAdam, D., McCarthy, J. D., & Zald, M. N. (1996). *Comparative Perspectives on Social Movements: Political Opportunities, Mobilizing Structures, and Cultural Framings*. Cambridge University Press.

	<p>sehingga saat pilpres 2024 tersebar mendukung tiga pasangan calon presiden – calon wakil presiden yaitu Anis Baswedan – Muhaimin Iskandar, Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming Raka dan Ganjar Pranowo – Mahfud MD. Kemudian paska pilpres yang berbarengan dengan pemilihan legislative, mereka menyatu dalam satu gerakan mengantisipasi calon tunggal pada pilkada 2024.</p> <p>Menyusul kesepakatan PKB dengan sejumlah pengusaha dan Partai Nasdem untuk mengajukan calon alternatif, membuat Koko Pede mengambil strategi membiarkan PDIP yang memiliki kader Ristawati Purwaningsih mendampingi petahana Arif Sugiyanto yang lekat dengan Golkar. “Terkait strategi ini, Koko Pede bertahan untuk tidak melakukan komunikasi politik dengan PDIP,” ungkap Presidium Koko Pede Prasetyo Panggih.</p> <p>Terlebih dari sejumlah pengusaha serta elite Nasdem dan PKB diketahui sedang pecah kongsi dengan petahana yang sebelumnya didukung mereka pada pilkada 2020 sebagai calon tunggal. Sehingga tarik ulurnya masih tersedia partai politik sebagai kendaraan petahana Arif – Rista untuk mengikuti kontestasi pilkada 2024. Sedangkan calon alternatif yang terdapat pasangan Lilis Nuryani – Zaeni Miftah tidak sampai memborong semua partai untuk menjadi calon tunggal. Peluang yang diambil Koko Pede dalam menerapkan strategi tersebut dengan rentang waktu setelah pileg 2024 sampai sebelum putusan Mahkamah Konstitusi (MK) pada 20 Agustus 2024 terkait penurunan ambang batas partai politik dalam mengajukan calon.</p>
--	---

Struktur mobilisasi	Presidium Koko Pede mengambil langkah dan cara sendiri-sendiri setelah ada kepastian bahwa pilkada Kebumen 2024 tanpa calon tunggal. Terkait strategi tindakan kolektif pada masing-masing personel, baik yang menjadi presidium, pengurus maupun simpatisan dan para pegiatnya tidak lagi mengatasnamakan Koko Pede.
Proses framing	
<i>Diagnostic framing,</i>	Demokrasi yang tidak sehat disebabkan oleh adanya calon tunggal pada pilkada 2020 dan berdampak pada mati surinya pengawasan dari legislative ketika bupati dari calon tunggal tersebut berkuasa. Sedangkan demokrasi tidak beradab manakala calon tunggal memborong semua partai yang berpotensi terjadi politik uang.
<i>Prognostic framing</i>	Munculnya calon alternatif sebelum penetapan KPU juga berpotensi menjadi calon tunggal pada pilkada 2024, seperti halnya petahana pada pilkada 2020 yang menjadi calon tunggal. Sehingga gerakan Koko Pede mengantisipasi calon tunggal terus berlanjut hingga penetapan KPU Kebumen pada 22 September 2024 yang memastikan diikuti dua pasangan calon yakni Arif Sugiyanto-Ristawati Purwaningsih dan Lilis Nuryani – Zaeni Miftah.
<i>Motivational framing</i>	Gerakan Koko Pede mengantisipasi calon tunggal pada pilkada 2024 dalam rangka memperjuangkan demokrasi yang sehat dan beradab di Kebumen.

Tabel.1.1. Analisis Konsep Gerakan Koko Pede

a. Peluang Politik (*Political Opportunity*)

Untuk menguji macam-macam bentuk ketegangan politik seperti demokratisasi, revolusi, nasionalisme dan gerakan sosial, pada tahun 1960-an ilmuwan Barat menggunakan beberapa mekanisme. Salah satunya adalah *Political Opportunity Structure* (POS) atau dalam Bahasa Indonesia disebut

dengan struktur kesempatan politik. Gerakan sosial akan terjadi ketika adanya perubahan dalam struktur, sehingga akan dilihat sebagai suatu kesempatan. Dengan kata lain jika suatu negara dalam struktur atau kebijakannya sedang mengalami perubahan dan perubahan tersebut tidak dikehendaki oleh masyarakat maka itu akan menjadikan kesempatan politik (*political opportunity*) dan melahirkan suatu gerakan sosial.³⁴

Ia akan muncul dengan menggunakan mekanisme POS (Political Opportunity Structure) ketika adanya empat faktor, pertama adalah terbukanya akses kepada lembaga-lembaga politik. Kedua, terjadi kekacauan pada keseimbangan politik sedangkan keseimbangan politik yang baru belum terbentuk. Ketiga, konflik di antara elite politik dan hal ini dijadikan kesempatan oleh para pelaku perubahan. Keempat, ketika elite politik yang berada dalam sistem mengajak berkoalisi kepada para pelaku perubahan untuk terlibat membuat kebijakan yang baru. Faktor-faktor ini hanyalah cerminan dari kasus-kasus tertentu. Variabel-variabel tersebut bisa digunakan dan dijadikan rujukan pada kasus gerakan sosial, tetapi tidak seharusnya semua variabel tersebut digunakan untuk menguji suatu gerakan sosial, tergantung pada kasus yang sedang terjadi saat itu.³⁵

Terbukanya akses kepada lembaga-lembaga politik dapat dilihat dari personel Presidium Koko Pede yang memiliki kedekatan dengan elite partai politik seperti PKB, Nasdem, PDIP dan Golkar. Bahkan dengan Gerindra, sehingga saat pilpres 2024, masing-masing diketahui tersebar mendukung tiga pasangan calon presiden – calon wakil presiden yaitu Anis Baswedan – Muhaimin Iskandar, Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming Raka dan Ganjar Pranowo – Mahfud MD. Kemudian paska pilpres yang berbarengan dengan pileg, mereka menyatu dalam satu gerakan mengantisipasi calon tunggal pada pilkada Kebumen 2024.

Mengenai faktor peluang politik lainnya yang terjadi kekacauan pada keseimbangan politik sedangkan keseimbangan politik yang baru belum

³⁴ Situmorang, Abdul Wahib Situmorang. 2013. *Gerakan Sosial: Teori dan Praktik*. Yogyakarta: Pustaka.Pelajar

³⁵ Situmorang, Abdul Wahid. 2007. *Gerakan Sosial Studi Kasus Beberapa Perlawanan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

terbentuk, dapat diketahui menyusul kesepakatan PKB serta sejumlah pengusaha di Kebumen dan Partai Nasdem untuk mengajukan calon alternatif, membuat Koko Pedes mengambil strategi membiarkan PDIP yang memiliki kader Ristawati Purwaningsih mendampingi petahana Arif Sugiyanto yang lekat dengan Golkar. “Terkait strategi ini, Koko Pedes bertahan untuk tidak melakukan komunikasi politik dengan PDIP,” ungkap Presidium Koko Pedes Prasetyo Panggih. Artinya, Koko Pedes tidak menjegal dan membiarkan petahana mendapatkan kendaraan politik untuk maju pilkada Kebumen 2024.

Terlebih dari sejumlah pengusaha dan elite Nasdem serta PKB, diketahui sedang pecah kongsi dengan petahana yang sebelumnya didukung mereka pada pilkada 2020 sebagai calon tunggal. Sehingga tarik ulurnya masih tersedia partai politik sebagai kendaraan petahana Arif Sugiyanto – Ristawati Purwaningsih untuk mengikuti kontestasi pilkada 2024. Sedangkan calon alternatif yang terdapat pasangan Lilis Nuryani – Zaeni Miftah tidak sampai memborong semua partai untuk menjadi calon tunggal. Peluang yang diambil Koko Pedes dalam menerapkan strategi tersebut dengan rentang waktu setelah pileg 2024 sampai sebelum putusan Mahkamah Konstitusi (MK) pada 20 Agustus 2024 terkait penurunan ambang batas partai politik dalam mengajukan calon.

b. Struktur Mobilisasi (*Mobilitation Structure*)

Konsep struktur mobilisasi sebagai cara-cara yang disepakati untuk terlibat dalam tindakan kolektif yang meliputi repertoar taktik-taktik tertentu, bentuk organisasi gerakan sosial khusus, dan repertoar modular (rancangan) gerakan sosial. Dengan kata lain struktur mobilisasi adalah sebagai susunan yaitu cara, langkah, maupun strategi tindakan kolektif yang berperan untuk alat mobilisasi suatu gerakan sosial. Dimensi yang bisa dijadikan alat struktur mobilisasi di antaranya adalah dimensi tidak resmi, seperti : jaringan aktivis, kelompok-kelompok kesamaan, komunitas memori. Serta dimensi resmi, seperti organisasi gerakan sosial, komite-komite protes, dan lembaga-lembaga gerakan.³⁶ Oleh karena itu peran organisasi sangat penting bagi keberlangsungan gerakan sosial, hal ini bisa disebut sebagai mobilisasi

³⁶ Sukmana, Oman. 2016. *Konsep dan Teori Gerakan Sosial*. Malang : Intrans Publishing

sumberdaya.³⁷ Sumber daya ini diantaranya adalah : pengetahuan, uang, media, tenaga kerja, kesetiakawanan, legitimasi dan dukungan internal dan eksternal dari penguasa.³⁸

Penjelasan lain oleh David S. Mayer, Nancy Whittier, dan Belinda Robnett dalam buku *Social Movements: Identity, Culture, and the State* : “*We see public policy reform not only as the result of movement activities but also as the cause of changes in movement strategy, claims, and tactics. In theoretical parlance, changes in policy influence political opportunities, and activists respond accordingly, trying to mobilize, or to affect new policy changes in these new circumstances*”. “Kita melihat reformasi kebijakan publik tidak hanya sebagai hasil dari aktivitas suatu gerakan, tetapi sebagai penyebab perubahan strategi gerakan, klaim dan taktik secara teoritis, perubahan dalam kebijakan mempengaruhi peluang politik, dan aktivis menanggapi dengan sesuai, mencoba untuk memobilisasi, atau untuk mempengaruhi perubahan kebijakan baru dalam situasi yang baru).³⁹ Oleh karena itu perubahan kebijakan publik tidak hanya bergantung pada aktivitas suatu gerakan, akan tetapi perubahan suatu kebijakan publik bisa dilihat dari strategi, klaim, dan taktik gerakan yang baik dan terstruktur dengan rapi. Dan perubahan suatu kebijakan akan mempengaruhi kesempatan politik jika aktivis yang terlibat mampu memobilisasi massa dengan baik untuk mempengaruhi kebijakan yang baru dalam permasalahan dan situasi yang sedang dihadapi”.

Presidium Koko Pede yang berjumlah empat orang mengambil langkah dan cara sendiri-sendiri setelah ada kepastian bahwa pilkada Kebumen 2024 tanpa calon tunggal. Dan terkait strategi tindakan kolektif pada masing-masing personel, baik yang menjadi presidium, pengurus maupun simpatisan dan para pegiatnya, juga tidak lagi mengatasnamakan Koko Pede. Bagi Presidium Koko Pede Prasetyo Panggih, dengan keberhasilan mengantisipasi calon tunggal pada pilkada 2024, maka Koko Pede secara otomatis membubarkan diri.

c. Proses Framing

Untuk mengetahui berhasil atau tidaknya suatu gerakan dapat dilihat dari sumber daya yang kuat seperti kepemimpinan, organisasi, dan kuatnya dana, juga kesempatan politik seperti adanya momentum politik yang tepat. Selain itu bagaimana para aktor perubahan tersebut bisa mengemas isu dengan

³⁷ Badawi, I. M. 2015. *Gerakan Sosial tanggap bencana (Studi Kasus Pola Gerakan Sosial Kelompok SIBAT, MTB dan Tanggul Bencana GKJW di Desa Sitarjo)*. Brawijaya Malang

³⁸ Suwarno, J. (2016). ‘Gerakan Muncar Rumahku’ dan Suwarno, J. (2016). ‘Gerakan Muncar Rumahku’ dan Strategi Mobilisasi Sumber Daya Pada Gerakan Sosial Penyelamatan Lingkungan. *Jurnal Pemikiran Sosiologi*

³⁹ Naples, N. (2002). *Materialist Feminist Discourse Analysis and Social Movement Research: Mapping the Changing Context for ‘Community Control.’ In Social movements: Identity, culture, and the state*. Oxford University Press.

baik, hal ini kita kenal dengan nama proses framing. Suksesnya gerakan sosial terletak pada sampai sejauh mana mereka memenangkan pertempuran atas arti. Hal ini sejalan dengan bagaimana para aktor perubahan bisa mempengaruhi makna dalam kebijaksanaan publik.⁴⁰ Oleh sebab itu para aktor perubahan harus mampu menjalankan tugas penting untuk mencapai tujuan yang diinginkan dengan cara membuat framing ketidakadilan dan problematika sosial yang sedang diperjuangkan.

Ada tiga komponen penting sebagai peran utama framing, diantaranya adalah : 1) *Diagnostic framing*, berperan untuk mengidentifikasi masalah dan sebab akibat dari masalah tersebut. Dengan cara ini bisa diketahui siapa yang menjadi korban atas ketidakadilan dan mengetahui pelaku ketidakadilan tersebut. 2) *Prognostic framing*, berperan untuk menawarkan solusi mengenai masalah yang sedang terjadi dan membuat strategi yang harus diperjuangkan sesuai dengan identifikasi sumber masalah. 3) *Motivational framing* bertujuan untuk menarik simpati massa agar tergerak melakukan aksi yaitu mempersiapkan kata-kata atau jargon yang cocok supaya memotivasi orang untuk terlibat dalam gerakan.⁴¹

Dalam *diagnostic framing*, demokrasi yang tidak sehat disebabkan oleh adanya calon tunggal pada pilkada 2020 dan berdampak pada mati surinya pengawasan dari legislative ketika bupati dari calon tunggal tersebut berkuasa. Sedangkan demokrasi tidak beradab manakala calon tunggal memborong semua partai yang berpotensi terjadi politik uang. Mengenai *prognostic framing*, munculnya calon alternatif sebelum penetapan KPU juga berpotensi menjadi calon tunggal pada pilkada 2024, seperti halnya petahana pada pilkada 2020 yang menjadi calon tunggal. Sehingga gerakan Koko Pede mengantisipasi calon tunggal terus berlanjut hingga penetapan KPU Kebumen pada 22 September 2024.

Dari analisis di atas diperoleh hasil penelitian yang mengungkap strategi membiarkan petahana Arif Sugiyanto - Ristawati Purwaningsih mendapatkan kendaraan politik untuk maju pilkada 2024 setelah kemunculan calon alternatif

⁴⁰ Situmorang, Abdul Wahid. 2007. *Gerakan Sosial Studi Kasus Beberapa Perlawanan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

⁴¹ Sumarwan, A. 2018. *Memahami Framing Gerakan Sosial*. Basis, 1(2), 24–30.

Lilis Nuryani - Zaeni Miftah yang berpotensi menjadi calon tunggal. Di mana peluang untuk menjadi calon tunggal akan diambil oleh kandidat siapa saja untuk menyiapkan kemenangan pesta demokrasi langsung sebelum penetapan calon oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Penelitian yang mengungkap gerakan Koko Pede mengantisipasi calon tunggal pada pilkada Kebumen 2024 ini masih menyisakan permasalahan pada pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat daerah (DPRD) Kabupaten Kebumen yang mengalami mati suri saat calon tunggal berkuasa. Sehingga bisa dilakukan penelitian berikutnya. Rekomendasinya ditujukan kepada Koko Pede agar terus konsisten dan eksis dalam mengawal demokrasi paska pilkada Kebumen 2024, baik dimenangkan oleh pasangan Lilis – Zaeni maupun Arif - Rista. Para kandidat juga perlu merangkul Koko Pede untuk bersama-sama membangun Kebumen. Tidak hanya terkait dengan demokrasi setiap lima tahun sekali, namun dalam berbagai bidang, terutama pemberdayaan masyarakat yang menitikberatkan pada pembangunan manusia kreatif di daerah berpenduduk lebih dari 1,3 juta jiwa ini.

KESIMPULAN

Gerakan Koalisi Konco Pejuang Demokrasi (Koko Pede) mengantisipasi calon tunggal pada pilkada Kebumen 2024 merupakan perwujudan dari perjuangan demokrasi yang sehat dan beradab. Sebelumnya, gerakan saat bernama Masyarakat Kotak Kosong (Mas Koko) melakukan perlawanan kepada calon tunggal pada pilkada Kebumen 2020 yang dinilai berdampak negative terhadap demokrasi. Gerakan yang melibatkan masyarakat sipil (*civil society*) itu juga sebagai manivestasi kebangkitan *civil society* di Kebumen. Di samping itu Koko Pede menjalankan moderasi beragama yang semestinya dilakukan oleh partai politik sebagai penggerak moderasi beragama supaya tercipta demokrasi yang sehat dan beradab. Di mana praktik yang dijalankan partai politik selama ini masih jauh dari moderasi beragama. Selain bisa dijadikan pembelajaran bagi daerah lain dalam proses kandidasi kepala daerah yang mengedepankan demokrasi sehat dan beradap serta bersikap moderat, gerakan Koko Pede dalam mengantisipasi calon tunggal pada pilkada 2024 juga memiliki nilai edukasi politik yang patut diapresiasi. Karena itu, konsistensi dan eksistensi Koko Pede sangat dibutuhkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah. 2024. *Lunturnya Hak Politik Kandidasi Calon Kepala Daerah Dalam Kekuasaan Partai Akibat Ongkos Pemilu Yang Mahal*. Jurnal Kolaboratif Sains Universitas Muhammadiyah Palu Vol. 7 No. 10
- Abqa, Muhammad Ardhi Razaq. 2020. *Partai Politik Dan Moderasi Beragama Sebagai Pilar Demokrasi di Indonesia*. Jurnal Resiprokal Universitas Tidar Vol. 2 No. 1
- Arikunto S. 1998. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Cetakan ke-11. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Badawi, I. M. 2015. *Gerakan Sosial tanggap bencana (Studi Kasus Pola Gerakan Sosial Kelompok SIBAT, MTB dan Tanggul Bencana GKJW di Desa Sitarjo)*. Brawijaya Malang.
- Bungin, Burhan. 2003. *Analisis Data Penelitian Kualitatif “Pemahaman Filosofis dan Metodologis ke Arah Penguasaan Model Aplikasi”*. Jakarta : Raja Grafindo Persada
- Daud, Muhammad Daffa. 2019. *Partai Politik dan Pendidikan Politik . Studi atas Program Pendidikan Politik Partai Golongan Karya Kota Tangerang Selatan*. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta
- Habermas, J. (2006). *Teori tindakan komunikatif buku I: Rasio dan Rasionalisasi Masyarakat*. Yogyakarta: Kreasi Wacana.
- Hanafi, Ridho Imawan. 2014. *Pemilihan Langsung Kepala Daerah di Indonesia : Beberapa Catatan Kritis untuk Partai Politik*. Jurnal Penelitain Politik. Volume 11 No.2
- <https://www.bawaslu.go.id/id/berita/fenomena-calon-tunggal-dalam-pilkada-meningkat-abhan-menarik-dijadikan-penelitian>
- <https://undiknas.ac.id/2024/06/melawan-kotak-kosong-menata-ulang-demokrasi-untuk-keadilan-dan-institusi-yang-kuat/>
- <https://fisipol.ugm.ac.id/kpu-ingin-civil-society-terlibat-aktif-di-tahun-politik/>
- John Fiske. 2007. *Cultural and Communication Studies Sebuah Pengantar Paling Komprehensif*, Yogyakarta. Jalasutra : 2007.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

- Malik, Gabriela Akhira dkk. 2021. *Penerapan Demokrasi Berkeadaban dalam Kebudayaan dan Tradisi Suku Bugis*. Jurnal Kewarganegaraan ITB Vol 5 No. 2
- McNair, Brian. 2003. *An Introduction To Political Communication*. New York: Rotlegde.
- Meyer, David S.; Whittier, Nancy; & Robnett, Belinda (eds.) 2002. *Social Movements: Identity, Culture, and the State*. Oxford: Oxford University Press.
- Moleong Lexy J. 2005. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mukhtar, Rifqi Shofiana. 2019. *Pandangan Politik Relawan Kotak Kosong Terhadap Calon Tunggal di Pilkada Kabupaten Pati Tahun 2017*. Skripsi. Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Naples, N. (2002). *Materialist Feminist Discourse Analysis and Social Movement Research: Mapping the Changing Context for 'Community Control.'* In *Social movements: Identity, culture, and the state*. Oxford University Press.
- Nimmo, Dan. 2001. *Komunikasi Politik: Khalayak dan Efek*, Bandung Bandung: Rosdakarya,
- Parmojo, Mochamad. *Kebangkitan Civil Society di Indonesia*. Jurnal At-Taqaddum, ,Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Negeri Islam Walisongo
- Prameswari, Lala Miami. 2016. *Pilkada dalam Mewujudkan Demokrasi*. (<https://babel.bawaslu.go.id/pilkada-dalam-mewujudkan-demokrasi/>)
- Sari, Diana Novita. 2020. *Gerakan Sosial dan Pilkada (Studi tentang Jaringan Kotak Kosong dalam Pemilihan Kepala Daerah Kota Tangerang Tahun 2018)*. Skripsi. Program Studi Ilmu Politik Fakultas Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Saweho, Grendy A. dkk. 2019. *Calon Tunggal dan Pilkada*. Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Sam Ratulangi Manado
- Situmorang, Abdul Wahib. 2013. *Gerakan Sosial: Teori dan Praktik*. Yogyakarta: Pustaka.Pelajar

- Situmorang, Abdul Wahid. 2007. *Gerakan Sosial Studi Kasus Beberapa Perlawanan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Suharko. 2006. *Gerakan Sosial Baru di Indonesia : Repertoar Gerakan. Petani*. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 1-34.
- Sukmana, Oman. 2016. *Konsep dan Teori Gerakan Sosial*. Malang : Intrans Publishing.
- Sumarwan, A. 2018. *Memahami Framing Gerakan Sosial*. Basis, 1(2), 24–30.
- Suwarno, J. 2016. '*Gerakan Muncar Rumahku*' dan Strategi Mobilisasi Sumber Daya Pada Gerakan Sosial Penyelamatan Lingkungan. Jurnal Pemikiran Sosiologi.
- Tarrow, Sidney. 1994. *Power in Movement: Social Movement, Collective Action, and Politics*. New York: Cambridge University Press.
- Widodo, Arif. 2021. *Partisipasi Masyarakat Berbasis Kearifan Lokal dalam Menumbuhkan Demokrasi di Kebumen*. Jurnal Ar-Rihlah Inovasi Pengembangan Pendidikan Islam Volume. 6. No.1.